



**Lampiran I
Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2/446/2025**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

SEKRETARIAT DAERAH

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB. I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 5 |
| BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 | 6 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda | 6 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setda | 14 |
| 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda | 16 |
| 2.4. Reviu terhadap RKPD..... | 18 |
| 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat | 30 |
| BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 32 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 32 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Setda | 33 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 35 |
| BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 54 |
| BAB. V PENUTUP | 58 |
| DAFTAR TABEL | |
| Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 | 7 |
| Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Salatiga | 15 |
| Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Renstra Sekretraiat Daerah Tahun 2026 | 19 |
| Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 | 31 |
| Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 | 41 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Salatiga harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah secara terencana, sistematis dan terukur dengan berpedoman kepada dokumen rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengamanatkan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib menyusun renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan renstra lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, renja SKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi RPJMD dan Renstra SKPD. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah untuk kepentingan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya ke dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya

Renja perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah memuat kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan dalam satu tahun. Renja selain sebagai acuan penyusunan RKA, juga untuk mereviu dan mengevaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Oleh karena itu, di dalam renja dijabarkan pula indikator kinerja dan anggarannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi.

Ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan memedomani Renstra Perangkat Daerah. Renja sebagai produk perencanaan digunakan untuk *protective benefits* yaitu meminimalisasi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, renja dapat digunakan untuk *positive benefits*, yaitu mengoptimalkan keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setda.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-

- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana kerja Setda disusun sebagai penjabaran Renstra dengan maksud:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.
- b. memberikan arah dan menyediakan pedoman perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan tupoksi Sekretariat Daerah.
- c. memfasilitasi dan mengakomodasi perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan secara realistis, efektif dan efisien;
- d. mengevaluasi hasil/kinerja Setda berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Renja Setda 2026 disusun dengan tujuan:

- a. meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. terlaksananya kegiatan-kegiatan Setda secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
- c. sebagai dokumen evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu guna perbaikan dan peningkatan kinerja Setda tahun yang akan datang;
- d. mewujudkan keselarasan dan kesesuaian program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja Setda dengan dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD).

3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Renja Setda 2026 yaitu meningkatnya koordinasi dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Setda Kota Salatiga ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Setda
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setda
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda
- 2.4. Reviu terhadap RKPD

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Terdiri dari rencana kegiatan dan Program serta target untuk Tahun 2026

Bab V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Setda pada tahun anggaran 2024 secara umum terlaksana seluruhnya. Adapun kinerja yang dicapai adalah empat dari lima indikator kinerja utama (IKU) masuk kategori **Sangat Baik**, sedangkan satu saja yang masuk kategori **Baik**. Terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan Setda yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan.

Anggaran pada 2024 yang dialokasikan untuk Setda Rp. 36.040.065.703,- terserap Rp. 34.552.622.590,- (95,87%). Dengan demikian terdapat efisiensi Rp. 1.487.443.113,- (4,13%). Dari tiga program Setda, terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja program dengan capaian kinerja dengan kategori sebagai berikut:

- > Sangat Baik 9 (53%);
- > Baik 7 (41%); dan
- > Cukup Baik 1 (6%).

Untuk selanjutnya, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun anggaran 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) dapat dilihat dalam **Tabel T-C.29** dibawah ini.

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Salatiga

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 4 01 01 2 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 4 01 01 2 01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 4 01 01 2 01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 4 01 01 2 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 4 01 01 2 02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 122 | 122 | 122 | 122 | 100% | 122 | 122 | 100% |
| 4 01 01 2 02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Prosentase Terselenggaranya administrasi barang milik daerah | 100 | | | | | | | |
| 4 01 01 2 03 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian | 1 | | | | | | | |
| 4 01 01 2 05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 05 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 4 01 01 2 05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 2 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Terlaksananya tertib administrasi umum | 100 | 100 | | | 100% | 100 | | |
| 4 01 01 2 06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| 4 01 01 2 07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 85 | 100 | 75 | 75 | 100% | 75 | 75 | 88% |
| 4 01 01 2 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 4 01 01 2 08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

| Kode | Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 2 08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ProsentaseTerlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 4 01 01 2 09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 23 | 23 | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% |
| 4 01 01 2 09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 91 | 91 | 91 | 91 | 100% | 91 | 91 | 100% |
| 4 01 01 2 09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 | 15 | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% |
| 4 01 01 2 09 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 300 | 291 | 300 | 300 | 100% | 300 | 300 | 100% |
| 4 01 01 2 09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Prosentase terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 5 | 4 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 4 01 01 2 09 113 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| 4 01 01 2 11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | |
| 4 01 01 2 11 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 50% |
| 4 01 01 2 11 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 2 11 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 12 | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | | | | | | |
| 4 01 01 2 12 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 12 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 12 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 13 | Penataan Organisasi | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | | |
| 4 01 01 2 13 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 4 01 01 2 13 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan public dan tata laksana | 3 | 2 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 4 01 01 2 13 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB | 4 | 3 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 4 01 01 2 13 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 3 | 3 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 133% |
| 4 01 01 2 14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 4 01 01 2 14 01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 2 14 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 01 2 14 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 01 02 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | 1 | | | | |
| 4 01 02 2 01 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | | | | | | | |
| 4 01 02 2 01 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 5 | 6 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 120% |
| 4 01 02 2 01 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 2 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 150% |
| 4 01 02 2 01 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 4 | 4 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 125% |
| 4 01 02 2 02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat | 100 | 96 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 4 01 02 2 02 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| 4 01 02 2 02 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 4 01 02 2 02 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|-----|------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8=(7/6) | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | 10=(5+7+9) | | | | | | | | | | | 11=(10/4) | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Prosentase terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | 100 | 83 | 100 | 100 | 100% | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 100 | 1.133 | 520 | 520 | 100% | 520 | 520 | 520% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 10 | 3 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan | 520 | 951 | 520 | 520 | 100% | 520 | 520 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 04 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | persentase terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 04 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 03 | | | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 3 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 01 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 100 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 03 2 04 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 4 01 03 2 04 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 4 01 03 2 02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 4 01 03 2 02 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 4 01 03 2 03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa | 100 | | | | | | | |
| 4 01 03 2 03 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 165 | 161 | 135 | 135 | 100% | 135 | 431 | 261% |
| 4 01 03 2 03 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 43 | 45 | 43 | 43 | 100% | 43 | 131 | 305% |
| 4 01 03 2 03 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 6 | 1 | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 83% |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanan masih terdapat capaian/realisasi yang belum memenuhi target indikator sebagaimana yang tercantum dalam renstra. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan renja yang akan datang agar kinerja yang dicapai lebih baik. Dalam pembahasan lebih lanjut tentang analisis kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat ada beberapa kegiatan pada tahun anggaran 2023 dan 2024 belum sesuai dengan target. Untuk lebih jelasnya kinerja pelayanan Setda dapat dilihat pada **Tabel T-C.30** dibawah ini.

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Tahun Analisis |
|-----|--|-----------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (10) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Indeks Kepuasan masyarakat | | | 84,75 | 84,75 | 85 | 85,67 | 86,32 | 84,75 | 85 | |
| 2 | Nilai Kepatuhan Standar pelayanan Publik | | | 81 | 81,25 | 81,5 | 95,78 | 98,15 | 81,25 | 81,5 | |
| 3 | Indeks Kematangan Organisasi Daerah | | | 34,47 | 34,67 | 34,87 | 34,45 | 36,16 | 34,67 | 34,87 | |
| 4 | Indeks RB | | | 71 | 72 | 73 | 71 | 71 | 72 | 73 | |
| 5 | Nilai SAKIP | | | 65 | 66 | 68 | 65,81 | 66,54 | 66 | 68 | |

Dari tabel di atas di tahun 2023, 1 (satu) indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Indeks Kematangan Organisasi Daerah (IKOD) dengan realisasi 34,45 (kategori baik) dari target 37,47. Target kinerja belum dapat dicapai dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana sehingga mengakibatkan proses perhitungan penilaian tingkat kematangan perangkat daerah belum dapat berjalan secara optimal.

Pada Tahun 2024 indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Indeks RB dengan realisasi capaian 71 (kategori baik) dari target 72. Realisasi capaian Tahun 2024 mengikuti capaian Tahun 2022 dikarenakan pada Tahun 2024 tidak diperoleh nilai Indeks PMPRB, hal ini dikarenakan pengisian PMPRB Tahun 2023 sudah tidak dilaksanakan akibat adanya perubahan pada teknis evaluasi reformasi birokrasi Tahun 2023 yang lebih menekankan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif sesuai dengan Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023 dan Kepmen PANRB Nomor 739 Tahun 2023.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah

a. Tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah

Secara umum Sekretariat Daerah telah melaksanakan kegiatan dengan sangat baik dengan realisasi fisik yang baik walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini berarti pelaksanaan program dan kegiatan Setda secara umum efektif dan efisien. Meskipun demikian, peningkatan harus terus dilakukan untuk mewujudkan peran dan fungsi Setda dalam perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan pengendalian kebijakan daerah yang lebih baik lagi.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Dalam penyusunan Renja Setda Kota Salatiga Tahun 2026, dilakukan terlebih dahulu dengan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Salatiga yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja belum seluruhnya optimal karena rasionalisasi anggaran;
2. Permasalahan pertanahan tidak kunjung tuntas karena data/informasi permasalahan tidak ter-*update*.
3. Belum optimalnya pelaksanaan monev penerapan SPM sehingga penerapan SPM kurang optimal.
4. Belum tersedianya pemetaan kerja sama daerah sehingga kerja sama antar daerah kurang optimal;
5. Pengajuan atau usulan raperda dan raperwali belum melampirkan draf raperda/raperwali dan naskah akademik/penjelasan sehingga menghambat penyelesaian produk hukum;
6. Belum tertib pendokumentasian proses pembahasan draf Raperda dan Raperwali sehingga menghambat penyelesaiannya;
7. LBH terakreditasi tidak ada yang mengajukan permohonan bantuan anggaran sehingga bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu tidak terserap optimal.

8. Masih rendahnya kesadaran ASN membayar zakat sehingga zakat yang terhimpun kurang maksimal;
9. Belum optimalnya koordinasi kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala Kota;
10. Belum Optimalnya fungsi kelembagaan tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah di tingkat Kecamatan dan Kota sehingga UKS kurang optimal menjalankan fungsinya
11. Kurang optimalnya proses pengadaan barang/jasa;
12. Kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
13. Kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan penataan infrastruktur dan perhubungan;
14. Kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan;
15. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan informatika sehingga penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan informatika kurang optimal;
16. Pelaksanaan beberapa tugas pokok dan fungsi Setda kurang optimal karena seharusnya menjadi tugas dan fungsi OPD lain.
17. Masih rendahnya koordinasi dalam upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan di atas, perlu penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menemukan solusi terbaik guna tercapainya misi Sekretariat Daerah.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah:

a. **Tantangan :**

- 1) Dinamika politik dan perubahan peraturan serta kebijakan nasional sulit diprediksi.
- 2) Perlunya penguatan dan koordinasi program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada OPD terkait.
- 3) Adanya perubahan aturan yang terjadi sehingga diperlukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku
- 4) Belum optimalnya fungsi koordinasi Sekretariat Daerah.

5) Penataan kembali tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah di tengah dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Peluang :

- 1) Sekretariat daerah menjadi fasilitator, evaluator, koordinator dan pengendali penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui kebijakan-kebijakan yang diambil agar kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana.
- 2) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 3) Terbukanya kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah.
- 4) Kemajuan berbagai teknologi, termasuk teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung optimalisasi kinerja.

Berdasarkan dari permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki Setda Kota Salatiga, maka dapat disimpulkan mejadi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Salatiga, yaitu :

1. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi koordinasi Sekretariat Daerah;
2. Merencanakan pemetaan kerja sama daerah sehingga kerja sama antar daerah lebih optimal;
3. Tindaklanjut dan peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah di tengah dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.4. Reviu terhadap RKPD

Pada **Tabel T-C 31** ditampilkan perbandingan antara RKPD 2026 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2026. Berdasarkan data tersebut, secara umum kegiatan yang ada telah sesuai dengan Renstra 2025-2029.

Tabel T-C 31 Review terhadap RKPD Tahun 2026

| No | RKPD 2026 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|--|----------------|-----------------------|---|--------|--|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan | 100 | 31.926.881.100 | 4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan | 100 | 32.407.838.853 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 86 | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 86 | | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 73 | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 73 | | |
| | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Terlaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 17.030.800 | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Terlaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 17.030.000 | |
| | 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 | 6.351.300 | 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 | 6.351.000 | |
| | 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 10.679.500 | 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 10.679.000 | |
| | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 19.510.740.759 | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 19.248.155.012 | |
| | 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 132 | 17.497.742.707 | 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 132 | 19.112.155.012 | |

| No | RKPD 2026 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|--|----------------|----------------------|--|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 | 2.006.998.052 | 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 | 130.000.000 | |
| | 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 6.000.000 | 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 6.000.000 | |
| | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | Persentase Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah | 100 | 210.500.000 | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | Persentase Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah | 100 | 158.500.000 | |
| | 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 210.500.000 | 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 158.500.000 | |
| | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 3.906.000 | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 3.906.000 | |
| | 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya | 1 | - | 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya | 0 | - | |
| | 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 | 3.906.000 | 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 | 3.906.000 | |
| | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase Terlaksananya Tertib Administrasi Umum | 100 | 3.018.424.893 | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase Terlaksananya Tertib Administrasi Umum | 100 | 2.963.131.791 | |
| | 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 40.085.700 | 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 40.085.700 | |

| No | RKPD 2026 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|--|----------------|---------------------|--|--------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 200.000.000 | 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 215.445.000 | |
| | 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 19.152.800 | 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 19.153.000 | |
| | 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | 120.000.000 | 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | 145.000.000 | |
| | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 60.000.000 | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 60.000.000 | |
| | 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 | 83.916.000 | 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 | 92.343.000 | |
| | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | 1.350.000.000 | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | 1.191.105.091 | |
| | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | 1.145.270.393 | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | 1.200.000.000 | |
| | 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Laporan Penyusutan Arsip Yang Dilaksanakan | 1 | - | 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Laporan Penyusutan Arsip Yang Dilaksanakan | 1 | - | |
| | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 | 148.387.700 | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 | 150.500.000 | |
| | 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 | 148.387.700 | 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 | 150.500.000 | |

| No | RKPD 2026 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|--|----------------|----------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 2.577.001.948 | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 4.396.631.850 | |
| | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 8.000.000 | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 8.000.000 | |
| | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 1.200.000.000 | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 985.250.850 | |
| | 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 500.000.000 | 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 500.000.000 | |
| | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 869.001.948 | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 2.903.381.000 | |
| | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | 3.201.257.500 | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | 2.166.446.000 | |
| | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 26 | 850.553.600 | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 26 | 718.196.000 | |
| | 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 | 379.913.900 | 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 | 405.000.000 | |

| No | RKPD 2026 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|--|----------------|----------------------|--|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 4 | 45.000.000 | 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 4 | 45.000.000 | |
| | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 175 | 338.000.000 | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 175 | 338.000.000 | |
| | 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | 1.462.790.000 | 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | 535.250.000 | |
| | 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 | 125.000.000 | 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 | 125.000.000 | |
| | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 | 1.017.000.000 | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 | 1.027.442.000 | |
| | 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 | 200.000.000 | 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 | 200.000.000 | |
| | 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 | 197.000.000 | 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 | 207.442.000 | |
| | 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4 | 20.000.000 | 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4 | 20.000.000 | |

| No | RKPD 2026 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|---|----------------|----------------------|---|--------|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 | 600.000.000 | 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 | 600.000.000 | |
| | 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | Terpenuhinya Fasilitas Kerumahtanggaan Pada Sekretariat Daerah | 100 | 1.360.000.000 | 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | Terpenuhinya Fasilitas Kerumahtanggaan Pada Sekretariat Daerah | | 1.350.000.000 | |
| | 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 1 | 660.000.000 | 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 1 | 750.000.000 | |
| | 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 | 660.000.000 | 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 | 560.000.000 | |
| | 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 1 | 40.000.000 | 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 1 | 40.000.000 | |
| | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 100 | 159.240.500 | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 100 | 155.640.500 | |
| | 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 2 | 33.467.000 | 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 2 | 60.640.500 | |
| | 4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 5 | 60.000.000 | 4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 5 | 30.000.000 | |
| | 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 4 | 26.600.000 | 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 4 | 26.000.000 | |

| No | RKPD 2026 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|---|----------------|----------------------|--|--------|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 | 10.000.000 | 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 | 10.000.000 | |
| | 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 3 | 29.173.500 | 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 3 | 29.000.000 | |
| | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 100 | 703.391.000 | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 100 | 770.455.700 | |
| | 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1 | 33.272.000 | 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1 | 38.196.000 | |
| | 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1 | 445.987.000 | 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1 | 482.974.000 | |
| | 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 | 224.132.000 | 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 | 249.285.700 | |
| | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan | 100 | 2.508.494.000 | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan | 100 | 2.516.904.900 | |
| | | | Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan | 100 | | | | Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan | 100 | | |
| | | | Cakupan fasilitasi kerjasama daerah | 100 | | | | Cakupan fasilitasi kerjasama daerah | 100 | | |
| | | | Skor LPPD | 3 | | | | Skor LPPD | 3 | | |

| No | RKPD 2026 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|---|----------------|----------------------|---|--------|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Ketepatan waktu penyampaian LKPJ | 100 | | | | Ketepatan waktu penyampaian LKPJ | 100 | | |
| | | | Prosentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum | 100 | | | | Prosentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum | 100 | | |
| | | | Prosentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat | 100 | | | | Tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat | 100 | | |
| | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | | Persentase Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | 100 | 396.300.000 | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | | Persentase Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | 100 | 604.358.900 | |
| | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 9 | 220.000.000 | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 4 | 270.158.900 | |
| | 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 2 | 63.531.000 | 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 2 | 84.000.000 | |
| | 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 4 | 112.769.000 | 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 4 | 250.200.000 | |
| | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesra | 100 | 1.892.674.000 | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesra | 100 | 1.457.263.500 | |
| | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 | 1.750.000.000 | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 | 1.316.811.500 | |
| | 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Pemerintah Daerah bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bidang Transmigrasi | 1 | 47.222.000 | 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Pemerintah Daerah bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bidang Transmigrasi | 1 | 45.000.000 | |

| No | RKPD 2026 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|--|----------------|---------------------|---|--------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Pemerintah Daerah bidang Kesehatan, bidang Kepemudaan dan Olahraga, bidang Perpustakaan | 1 | 95.452.000 | 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Pemerintah Daerah bidang Kesehatan, bidang Kepemudaan dan Olahraga, bidang Perpustakaan | 1 | 95.452.000 | |
| | 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum | 100 | 198.291.000 | 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum | | 425.282.500 | |
| | 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan | 325 | 41.056.000 | 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan | 325 | 125.282.500 | |
| | 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum | 10 | 77.871.000 | 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum | 10 | 150.000.000 | |
| | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang dievaluasi | 8 | | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang dievaluasi | 8 | - | |
| | 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan dan Pengelolaan Informasi Hukum | 325 | 79.364.000 | 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan dan Pengelolaan Informasi Hukum | 325 | 150.000.000 | |
| | 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah | | Persentase Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah | 100 | 21.229.000 | 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah | | Persentase Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah | 100 | 30.000.000 | |
| | 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | 1 | 21.229.000 | 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | 1 | 30.000.000 | |

| No | RKPD 2026 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|--|----------------|---------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan | 100 | 671.246.000 | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan | 100 | 1.061.570.600 | |
| | | | Cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT | 100 | | | | Cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT | 100 | | |
| | | | Cakupan koordinasi dan pembinaan BUMD/BLUD | 100 | | | | Cakupan koordinasi dan pembinaan BUMD/BLUD | 100 | | |
| | | | Cakupan koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA | 100 | | | | Cakupan koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA | 100 | | |
| | | | Cakupan koordinasi POK | 100 | | | | Cakupan koordinasi POK | 100 | | |
| | | | Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 60 | | | | Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 60 | | |
| | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 100 | 71.470.000 | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 100 | 126.238.000 | |
| | 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 5 | 25.311.000 | 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 5 | 63.746.000 | |
| | 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 | 33.666.000 | 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 | 38.746.000 | |
| | 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 2 | 12.493.000 | 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 2 | 23.746.000 | |
| | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 100 | 130.000.000 | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 100 | 160.224.900 | |
| | 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 3 | 130.000.000 | 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 3 | 160.224.900 | |

| No | RKPD 2026 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---------------|---|--------|--|----------------|-----------------------|---|--------|--|----------------|---------------------|-----------------------|
| | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 100 | 303.382.000 | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 100 | 286.610.900 | |
| | 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 2 | 61.877.000 | 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 3 | 61.877.000 | |
| | 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 43 | 91.124.000 | 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 5 | 91.124.000 | |
| | 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 165 | 150.381.000 | 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 2 | 133.609.900 | |
| | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Perijinan Lingkungan, Prosentase Penghematan energi Di Institusi Pemerintah | 100 | 166.394.000 | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Perijinan Lingkungan, Prosentase Penghematan energi Di Institusi Pemerintah | 100 | 488.496.800 | |
| | 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 3 | 153.000.000 | 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 3 | 450.000.000 | |
| | 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 3 | 2.294.000 | 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 3 | 16.745.000 | |
| | 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 2 | 11.100.000 | 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 2 | 21.751.800 | |
| Jumlah | | | | | 35.106.621.100 | Jumlah | | | | | 35.986.314.353 |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kota Salatiga yang salah satu fungsinya sebagai koordinator penyelenggaraan kebijakan pada tahun 2026 mendapat usulan hibah yang direkomendasikan oleh Tim Penyusun RKPD untuk sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual berupa hibah anggaran untuk dipergunakan Baznas Kota Salatiga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jura rupiah).

Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

| No | Program / kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume (Rp) | Catatan |
|----|--|---------------|------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kota Salatiga | Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesra | 100.000.000 | Hibah untuk Pelaksanaan kegiatan BAZNAS |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan RKPD Tahun 2026 mempedomani Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 8 agenda pembangunan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan transformasi sosial;
- b. Mewujudkan transformasi ekonomi;
- c. Mewujudkan transformasi tata kelola;
- d. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia;
- e. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- f. Pembangunan kewilayahan;
- g. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- h. Kestinambungan Pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

Visi Jawa Tengah 2025 – 2029 yaitu “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan misi ke-2 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas, dengan program prioritas :

1. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak.
2. Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan.

Hal ini selaras dengan salah satu program Sekretariat Daerah Kota Salatiga yaitu program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 sesuai dengan sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2026 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital dan misi pembangunan yang ke-3 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif

terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur”, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Salatiga yaitu Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, dengan kebijakan difokuskan pada:

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
2. Memastikan bahwa seluruh pelayanan publik di setiap sektor memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sekretariat Daerah menurut Peraturan Wali Kota Salatiga No. 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas, Setda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga selama lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah dan memiliki keterkaitan dengan cita-cita perangkat daerah yang ingin dicapai.

Untuk mewujudkan Pencapaian Misi 3 RPJMD dengan Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif

terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur, maka ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah Kota Salatiga yaitu

1. Tujuan

Mengindik dari dokumen Renstra 2025-2029 dirumuskan tujuan Renja Sekretariat Daerah Kota Salatiga yaitu “Meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah”.

2. Sasaran

Sasaran renja Sekretariat Daerah Kota Salatiga Yaitu “Meningkatnya koordinasi dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Salatiga
Tahun 2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Target Tahun 2026 |
|----|--|--|--|----------------------|
| 1. | Meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah | | Indeks Kualitas Kebijakan | 66,50 |
| | | | IKM Kota | 86,36 |
| | | | Nilai SAKIP Kota | 66,80 |
| | | Meningkatnya koordinasi dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | Nilai kepatuhan standar pelayanan publik | 98,2 |
| | | | Return on investment (ROI) BUMD | 10,25 |
| | | | Nilai LPPD | 3,13 |

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Salatiga pada tahun 2026 dirumuskan berdasarkan beberapa faktor, yaitu antara lain adalah hasil telaah kebijakan nasional, telaah tujuan dan sasaran renstra dan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2026. Beberapa faktor tersebut kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)

a. Bagian Pemerintahan

- 1) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, terdiri atas subkegiatan:
 - a) Penataan Administrasi Pemerintahan;
 - b) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
 - c) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah, dengan subkegiatan:
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.

b. Bagian Hukum

- Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi hukum, terdiri atas subkegiatan:
- a) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - b) Fasilitasi Bantuan Hukum;
 - c) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

c. Bagian Kesra

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas subkegiatan:

- a) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- b) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
- c) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)

a. Bagian Administrasi Pembangunan

- 1) Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, terdiri atas subkegiatan:
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Pelaksanaan administrasi Pembangunan, dengan subkegiatan
 - a) Pengendalian dan evaluasi program Pembangunan.

b. Bagian Perekonomian dan SDA

- 1) Kegiatan Pelaksanaan kebijakan perekonomian, terdiri atas subkegiatan:
 - a) Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - b) Pengendalian dan distribusi perekonomian;
 - c) Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
- 2) Kegiatan Pemantauan kebijakan sumber daya alam, terdiri atas subkegiatan:
 - a) Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - b) Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup;
 - c) Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air.

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, terdiri atas subkegiatan:
 - a) Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - b) Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c) Pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Asisten Administrasi Umum)

a. Bagian Umum

- 1) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, terdiri atas subkegiatan:

- a) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 - b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
 - c) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- 2) Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan subkegiatan:
 - a) Pengamanan barang milik daerah SKPD.
 - 3) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan subkegiatan
 - a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.
 - 4) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, terdiri atas subkegiatan:
 - a) Penyediaan bahan logistic kantor;
 - b) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - c) Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - d) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - g) Fasilitasi kunjungan tamu;
 - h) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - i) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 5) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan subkegiatan:
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - 6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri atas subkegiatan:
 - a) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - b) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - c) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik;
 - d) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - 7) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri atas subkegiatan:
 - a) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;

- b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - d) Pemeliharaan mebel;
 - e) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - f) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.
- 8) Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdiri atas subkegiatan:
- a) Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b) Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c) Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d) Pelaksanaan *medical check-up* kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 9) Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, terdiri atas subkegiatan:
- a) Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah;
 - b) Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah;
 - c) Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah.

b. Bagian Organisasi

- 1) Kegiatan Penataan organisasi, terdiri atas subkegiatan:
- a) Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan;
 - b) Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana;
 - c) Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana;
 - e) Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.

c. Bagian Prokompim

1) Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, terdiri atas subkegiatan:

- a) Fasilitasi komunikasi pimpinan;
- b) Pendokumentasian tugas pimpinan;
- c) Fasilitasi keprotokolan.

Berikut adalah Tabel Program Prioritas Nasional, Proritas Gubernur Jawa Tengah dan Prioritas Wali Kota Salatiga Tahun 2025 – 2029

| Program Prioritas Nasional | Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah | Program Prioritas Kota Salatiga |
|---|--|---|
| Misi Ke- 5 “Mentransformasi Tata Kelola Pemerintahan” | Misi Ke-3 “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas” | Misi Ke-2 “Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM” |
| Melalui Program: - Penguatan Reformasi Birokrasi - Peningkatan Pelayanan Publik | Melalui Program : 1. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak 2. Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan | Melalui Program : Salatiga Berkarya |

Sesuai dengan Program Prioritas Kota Salatiga tersebut di atas, maka dapat disajikan sub kegiatan Sekretariat Daerah yang mendukung program proritas pembangunan Kota Salatiga sebagai berikut :

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|----|---------------------------|--|------------------------------------|--|
| 1 | Program Salatiga Berkarya | Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |

Tabel Rumusan rencana program dan kegiatan Setda Kota Salatiga tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Salatiga

| Kode | | | | | | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|------|----|----|---|----|----|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| 4 | 01 | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100 | 17.030.000 | APBD | | 100 | 30.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Bag. Administrasi Pembangunan | 5 | 6.351.000 | APBD | | 4 | 15.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Bag. Administrasi Pembangunan | 2 | 10.679.000 | APBD | | 2 | 15.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| 4 01 01 2 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya tertib adminitrasi keuangan perangkat daerah | | 100 | 19.248.155.012 | APBD | | 100 | 22.215.484.187 |
| 4 01 01 2 02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Bagian Umum | 132 | 19.112.155.012 | APBD | | 132 | 20.108.884.187 |
| 4 01 01 2 02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Bagian Umum | 1 | 130.000.000 | APBD | | 1 | 2.100.000.000 |
| 4 01 01 2 02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Bagian Umum | 1 | 6.000.000 | APBD | | 1 | 6.600.000 |
| 4 01 01 2 03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Prosentase Terselenggaranya administrasi barang milik daerah | | 100 | 158.500.000 | APBD | | 100 | 213.950.000 |
| 4 01 01 2 03 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Bagian Umum | 1 | 158.500.000 | APBD | | 1 | 213.950.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | |
| 4 01 01 2 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian | | 100 | 3.906.000 | APBD | | 100 | 7.000.000 |
| 4 01 01 2 05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan | Bagian Umum | 1 | - | | | - | - |
| 4 01 01 2 05 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Bagian Umum | 1 | 3.906.000 | APBD | | 1 | 7.000.000 |
| 4 01 01 2 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Terlaksananya tertib administrasi umum | | 100 | 2.963.131.791 | APBD | | 100 | 3.358.742.070 |
| 4 01 01 2 06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Bagian Umum | 1 | 40.085.700 | APBD | | 1 | 44.094.270 |
| 4 01 01 2 06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Bagian Umum | 1 | 215.445.000 | APBD | | 1 | 220.000.000 |
| 4 01 01 2 06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Bagian Umum | 1 | 19.153.000 | APBD | | 1 | 22.000.000 |
| 4 01 01 2 06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Bagian Umum | 3 | 145.000.000 | APBD | | 1 | 132.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| 4 01 01 2 06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Bagian Umum | 1 | 60.000.000 | APBD | | 1 | 66.000.000 |
| 4 01 01 2 06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Bagian Umum | 1 | 92.343.000 | APBD | | 1 | 89.647.800 |
| 4 01 01 2 06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Bagian Umum | 1 | 1.191.105.091 | APBD | | 1 | 1.485.000.000 |
| 4 01 01 2 06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Bagian Umum | 1 | 1.200.000.000 | APBD | | 1 | 1.250.000.000 |
| 4 01 01 2 06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Laporan Penyusutan Arsip Yang Dilaksanakan | Bagian Umum | 1 | - | | | 1 | 50.000.000 |
| 4 01 01 2 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah | | 100 | 150.500.000 | APBD | | 100 | 92.000.000 |
| 4 01 01 2 07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Bagian Umum | 2 | 150.500.000 | APBD | | 100 | 92.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| 4 01 01 2 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100 | 4.396.631.850 | APBD | | 100 | 2.878.800.000 |
| 4 01 01 2 08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bagian Umum | 1 | 8.000.000 | APBD | | 1 | 8.800.000 |
| 4 01 01 2 08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Bagian Umum | 1 | 985.250.850 | APBD | | 1 | 1.320.000.000 |
| 4 01 01 2 08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Bagian Umum | 1 | 500.000.000 | APBD | | 1 | 550.000.000 |
| 4 01 01 2 08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Bagian Umum | 1 | 2.903.381.000 | APBD | | 1 | 1.000.000.000 |
| 4 01 01 2 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ProsentaseTerlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | | 100 | 2.166.446.000 | APBD | | 100 | 2.092.000.000 |
| 4 01 01 2 09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Bagian Umum | 26 | 718.196.000 | APBD | | 23 | 790.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| 4 01 01 2 09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Bagian Umum | 11 | 405.000.000 | APBD | | 91 | 390.500.000 |
| 4 01 01 2 09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Bagian Umum | 4 | 45.000.000 | APBD | | 20 | 49.500.000 |
| 4 01 01 2 09 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Bagian Umum | 175 | 338.000.000 | APBD | | 300 | 214.500.000 |
| 4 01 01 2 09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Prosentase terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Bagian Umum | 5 | 535.250.000 | APBD | | 5 | 510.000.000 |
| 4 01 01 2 09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Bagian Umum | 3 | 125.000.000 | APBD | | 7 | 137.500.000 |
| 4 01 01 2 11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | | 100 | 1.027.442.000 | APBD | | 100 | 1.148.700.000 |
| 4 01 01 2 11 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Bagian Umum | 2 | 200.000.000 | APBD | | 2 | 250.000.000 |

| Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|--|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Bagian Umum | 2 | 207.442.000 | APBD | | 1 | 216.700.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 11 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Bagian Umum | 4 | 20.000.000 | | | | 22.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Bagian Umum | 2 | 600.000.000 | APBD | | 2 | 660.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 12 | | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Terpenuhinya Fasilitas Kerumahtanggaan Pada Sekretariat Daerah | | 100 | 1.350.000.000 | APBD | | 100 | 1.496.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Bagian Umum | 1 | 750.000.000 | APBD | | 1 | 726.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Bagian Umum | 1 | 560.000.000 | APBD | | 1 | 726.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Bagian Umum | 1 | 40.000.000 | APBD | | 1 | 44.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---------------------|--|--|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatf (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatf (Rp) |
| 4 01 01 2 13 | Penataan Organisasi | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | 100 | 155.640.500 | APBD | | 100 | 285.000.000 |
| 4 01 01 2 13 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan | Bagian Organisasi | 2 | 60.640.500 | APBD | | | 43.000.000 |
| 4 01 01 2 13 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan public dan tata laksanakan | Bagian Organisasi | 5 | 30.000.000 | APBD | | | 115.000.000 |
| 4 01 01 2 13 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB | Bagian Organisasi | 4 | 26.000.000 | APBD | | | 75.000.000 |
| 4 01 01 2 13 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik | Bagian Organisasi | 1 | 10.000.000 | APBD | | | 12.000.000 |
| 4 01 01 2 13 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Bagian Organisasi | 3 | 29.000.000 | APBD | | | 40.000.000 |
| 4 01 01 2 14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan | | 100 | 770.455.700 | APBD | | 100 | 783.600.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---------------------|--|--|---------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| 4 01 01 2 14 01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Bagian Prokompim | 1 | 38.196.000 | APBD | | 36.600.000 | |
| 4 01 01 2 14 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Bagian Prokompim | 1 | 482.974.000 | APBD | | 500.000.000 | |
| 4 01 01 2 14 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Bagian Prokompim | 1 | 249.285.700 | APBD | | 247.000.000 | |
| 4 01 02 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | |
| 4 01 02 2 01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | | 100 | 604.358.900 | APBD | | 710.000.000 | |
| 4 01 02 2 01 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Bagian Pemerintahan | 9 | 270.158.900 | APBD | 9 | 270.000.000 | |
| 4 01 02 2 01 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Bagian Pemerintahan | 2 | 84.000.000 | APBD | 2 | 90.000.000 | |
| 4 01 02 2 01 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Bagian Pemerintahan | 4 | 250.200.000 | APBD | 4 | 350.000.000 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| 4 01 02 2 02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat | | 100 | 1.457.263.500 | APBD | | 100 | 2.145.000.000 |
| 4 01 02 2 02 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual | Bagian Kesra | 1 | 1.316.811.500 | APBD | | | 2.000.000.000 |
| 4 01 02 2 02 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Bagian Kesra | 1 | 45.000.000 | APBD | | | 45.000.000 |
| 4 01 02 2 02 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Bagian Kesra | 1 | 95.452.000 | APBD | | | 100.000.000 |
| 4 01 02 2 03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Prosentase terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | | 100 | 425.282.500 | APBD | | 100 | 552.338.000 |
| 4 01 02 2 03 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Bagian Hukum | 325 | 125.282.500 | APBD | | | 221.635.000 |
| 4 01 02 2 03 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Bagian Hukum | 10 | 150.000.000 | APBD | | | 225.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---------------------|---|--|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang dievaluasi | Bagian Hukum | 8 | - | | | | |
| 4 01 02 2 03 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengeblaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan | Bagian Hukum | 325 | 150.000.000 | APBD | | | 105.703.000 |
| 4 01 02 2 04 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | persentase terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah | | 100 | 30.000.000 | | | | 45.000.000 |
| 4 01 02 2 04 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Bagian Pemerintahan | 1 | 30.000.000 | APBD | | | 45.000.000 |
| 4 01 03 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | | | | | | | | |
| 4 01 03 2 01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | 100 | 126.238.000 | APBD | | | 80.000.000 |
| 4 01 03 2 01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Bagian PSDA | 5 | 63.746.000 | APBD | | | 45.000.000 |
| 4 01 03 2 01 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Bagian PSDA | 4 | 38.746.000 | APBD | | | 20.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---------------------|---|--|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| 4 01 03 2 01 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Bagian PSDA | 2 | 23.746.000 | APBD | | 15.000.000 | |
| 4 01 03 2 02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | 100 | 160.224.900 | | | 160.000.000 | |
| 4 01 03 2 02 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Bagian Administrasi Pembangunan | 3 | 160.224.900 | APBD | 100 | 160.000.000 | |
| 4 01 03 2 03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa | | 100 | 286.610.900 | | 100 | 1.320.000.000 | |
| 4 01 03 2 03 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Bagian PBJ | 2 | 61.877.000 | APBD | | 390.000.000 | |
| 4 01 03 2 03 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Bagian PBJ | 43 | 91.124.000 | APBD | | 400.000.000 | |
| 4 01 03 2 03 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Bagian PBJ | 43 | 133.609.900 | APBD | | 530.000.000 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | |
| 4 01 03 2 04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Perijinan Lingkungan, Prosentase Penghematan energi Di Institusi Pemerintah | | 100 | 488.496.800 | | | | 515.000.000 |
| 4 01 03 2 04 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Bagian PSDA | 0 | 450.000.000 | APBN | | | 500.000.000 |
| 4 01 03 2 04 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Bagian PSDA | 0 | 16.745.000 | APBD | | | 3.000.000 |
| 4 01 03 2 04 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Bagian PSDA | 0 | 21.751.800 | APBD | | | 12.000.000 |
| | | | | | 35.986.314.353 | | | | 40.128.614.257 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Uraian tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Rumusan rencana program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026 ditampilkan pada tabel yang berisikan kode, urusan, bidang urusan pemerintah daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif dan kebutuhan dana sebagaimana dibawah ini.

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp) | Analisis Kebutuhan Anggaran (Rp) | |
|---------------|----|----|---|----|---|---|----------------------------------|----------------|
| 4 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 31.926.881.100 | 32.407.838.853 | |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.030.800 | 17.030.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.351.300 | 6.351.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.679.500 | 10.679.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 19.510.740.759 | 19.248.155.012 | |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.497.742.707 | 19.112.155.012 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2.006.998.052 | 130.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 210.500.000 | 158.500.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 210.500.000 | 158.500.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 3.906.000 | 3.906.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | - |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3.906.000 | 3.906.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3.018.424.893 | 2.963.131.791 | |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.085.700 | 40.085.700 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 200.000.000 | 215.445.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 19.152.800 | 19.153.000 |

| Kode Rekening | | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp) | Analisis Kebutuhan Anggaran (Rp) |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----|---|----------------------|----------------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 120.000.000 | 145.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 83.916.000 | 92.343.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.350.000.000 | 1.191.105.091 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.145.270.393 | 1.200.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - | - |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 148.387.700 | 150.500.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 148.387.700 | 150.500.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.577.001.948 | 4.396.631.850 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.200.000.000 | 985.250.850 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 869.001.948 | 2.903.381.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.201.257.500 | 2.166.446.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 850.553.600 | 718.196.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 379.913.900 | 405.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 338.000.000 | 338.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.462.790.000 | 535.250.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 125.000.000 | 125.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.017.000.000 | 1.027.442.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 197.000.000 | 207.442.000 |

| Kode Rekening | | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp) | Analisis Kebutuhan Anggaran (Rp) |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----|---|----------------------|----------------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2 | 11 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 600.000.000 | 600.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 12 | | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | 1.360.000.000 | 1.350.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 660.000.000 | 750.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 660.000.000 | 560.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 13 | | Penataan Organisasi | 159.240.500 | 155.640.500 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 33.467.000 | 60.640.500 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 60.000.000 | 30.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 26.600.000 | 26.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 13 | 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 13 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 29.173.500 | 29.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 703.391.000 | 770.455.700 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan | 33.272.000 | 38.196.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 445.987.000 | 482.974.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 224.132.000 | 249.285.700 |
| 4 | 01 | 02 | | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 2.508.494.000 | 2.516.904.900 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | 396.300.000 | 604.358.900 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 01 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 220.000.000 | 270.158.900 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 63.531.000 | 84.000.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 112.769.000 | 250.200.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 1.892.674.000 | 1.457.263.500 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1.750.000.000 | 1.316.811.500 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 47.222.000 | 45.000.000 |

| Kode Rekening | | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp) | Analisis Kebutuhan Anggaran (Rp) |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----|---|-----------------------|----------------------------------|
| 4 | 01 | 02 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 95.452.000 | 95.452.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 198.291.000 | 425.282.500 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 41.056.000 | 125.282.500 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 77.871.000 | 150.000.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 79.364.000 | 150.000.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 04 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 21.229.000 | 30.000.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 04 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 21.229.000 | 30.000.000 |
| 4 | 01 | 03 | | | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | 671.246.000 | 1.061.570.600 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 71.470.000 | 126.238.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 25.311.000 | 63.746.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 33.666.000 | 38.746.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 01 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | 12.493.000 | 23.746.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 130.000.000 | 160.224.900 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 130.000.000 | 160.224.900 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 303.382.000 | 286.610.900 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 61.877.000 | 61.877.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 91.124.000 | 91.124.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 150.381.000 | 133.609.900 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 166.394.000 | 488.496.800 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 153.000.000 | 450.000.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 04 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 2.294.000 | 16.745.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 04 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 11.100.000 | 21.751.800 |
| TOTAL | | | | | | | 35.106.621.100 | 35.986.314.353 |

Total analisis kebutuhan anggaran Sekretariat Daerah Kota Salatiga untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 sebesar Rp. 35.986.314.353,-

Rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga yang sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tergambar seperti tabel Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada Lampiran.

BAB V

PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kota Salatiga tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Penyusunan Renja Setda merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan Kota Salatiga secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan anggaran kegiatan.

A. Catatan Penting

Keberadaan Renja Setda tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur capaian kinerja dan program yang lebih baik serta dapat dijadikan dasar melakukan evaluasi kinerja Setda satu tahun ke depan. Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini diharapkan pula mampu menjadi arah dan pedoman untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Salatiga yang ditunjang dengan optimalisasi koordinasi dan peran aktif semua pihak, baik di lingkungan Sekretariat Daerah khususnya maupun Pemerintah Kota Salatiga pada umumnya.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam melaksanakan Renja Setda Kota Salatiga tahun 2026, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh pejabat dan staff Setda Kota Salatiga secara individu dan organisasi harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
3. Dalam pelaksanaan Renja 2026 dimungkinkan terjadi perubahan baik dari evaluasi yang dilakukan Setda Kota Salatiga ataupun dari pihak eksternal Setda, seperti Bappeda, BPKPD dan Inspektorat. Perubahan terhadap pelaksanaan Renja 2026 tersebut akan diakomodir melalui penyusunan Perubahan Renja Setda 2026.

C. Rencana Tindak Lanjut

Beberapa rencana tindak lanjut yang mendukung dalam pelaksanaan Renja 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan semua program dan kegiatan yang telah diuraikan dalam dokumen Renja, sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Setda Kota Salatiga sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing;
3. Memastikan bahwa kegiatan Setda berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2026 ini disusun agar dapat menghadirkan *protective benefits* dan *positive benefits* sehingga perlu dijadikan pedoman oleh seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mencapai kinerja yang optimal.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------------------|---|----------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 26.123.167.600,00 | | | | | | | 29.551.726.257,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 26.123.167.600,00 | | | | | | | 29.551.726.257,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 26.123.167.600,00 | | | | | | | 29.551.726.257,00 | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan</i> | - | | | 100 persen | 26.123.167.600,00 | | | | | | - | 29.551.726.257,00 | |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD Jumlah orang yg menerima gaji & tunjangan ASN</i> | - | | | 1 Dokumen 1 Dokumen 132 orang | 19.510.740.759,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 22.215.484.187,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 132 Orang/bulan | 17.497.742.707,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 20.108.884.187,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | | | | 1 Dokumen | 2.006.998.052,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 2.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 6.600.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</i> | - | | | 1 paket | 3.018.424.893,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 3.308.742.070,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 40.085.700,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 44.094.270,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 200.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 19.152.800,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 22.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 120.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 132.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 66.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | | | | 1 Dokumen | 83.916.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 89.647.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | | | | 1 Laporan | 1.350.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 1.485.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 1 Laporan | 1.145.270.393,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 1.250.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>persentase terlaksananya tertib administrasi umum Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i> | - | | | 100 persen 100 persen | 2.577.001.948,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 2.878.800.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 8.800.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 1 Laporan | 1.200.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 1.320.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Laporan | 500.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 550.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Laporan | 869.001.948,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 1.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | <i>terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah</i> <i>Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah</i> | - | | | 2 orang 100 persen | 1.017.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 1.148.700.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | | | | 2 Orang/Bulan | 200.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 197.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 216.700.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | | | | 4 Orang | 20.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 22.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | | | | 2 Orang/Bulan | 600.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan | ASN | | 660.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | BAGIAN PEMERINTAHAN | | | | | | 417.529.000,00 | | | | | | | 755.000.000,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 417.529.000,00 | | | | | | | 755.000.000,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 417.529.000,00 | | | | | | | 755.000.000,00 | |
| 1. | 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | <i>cakupan koordinasi administrasi pemerintahan skor LPPD</i> | - | | | 100 persen 3,1 nilai | 417.529.000,00 | | | | | | - | 755.000.000,00 | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | <i>1. Prosentase kegiatan administrasi Tata Pemerintahan prosentase terlaksananya administrasi tata pemerintahan</i> | - | | | 100 persen 100 prosen | 396.300.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 710.000.000,00 | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i> | | | | 9 Dokumen | 220.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 270.000.000,00 | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i> | | | | 2 Dokumen | 63.531.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 90.000.000,00 | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i> | | | | 4 Dokumen | 112.769.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 350.000.000,00 | BAGIAN PEMERINTAHAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i> | | | | 1 Dokumen | 1.750.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 2.000.000.000,00 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB</i> | | | | 1 Dokumen | 47.222.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 45.000.000,00 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i> | | | | 1 Dokumen | 95.452.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 100.000.000,00 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | BAGIAN HUKUM | | | | | | | 198.291.000,00 | | | | | | | 552.338.000,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 198.291.000,00 | | | | | | | 552.338.000,00 | | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 198.291.000,00 | | | | | | | 552.338.000,00 | | |
| 1. | 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | <i>prosentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum</i> | - | | | 100 persen | 198.291.000,00 | | | | | | - | 552.338.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | <i>persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi & koordinasi hukum</i> | - | | | 100 prosen | 198.291.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | - | 552.338.000,00 | BAGIAN HUKUM |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i> | | | | 420 Dokumen | 41.056.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 221.635.000,00 | BAGIAN HUKUM |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i> | | | | 10 Kasus | 77.871.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 225.000.000,00 | BAGIAN HUKUM |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i> | | | | 420 Dokumen | 79.364.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 105.703.000,00 | BAGIAN HUKUM |
| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | | | 303.382.000,00 | | | | | | | 1.320.000.000,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 303.382.000,00 | | | | | | | 1.320.000.000,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 303.382.000,00 | | | | | | | 1.320.000.000,00 | |
| 1. | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | <i>persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan</i> | - | | | 60 persen | 303.382.000,00 | | | | | | - | 1.320.000.000,00 | |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | <i>persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa</i> | - | | | 84.15 persen | 303.382.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | - | 1.320.000.000,00 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i> | | | | 2 Dokumen | 61.877.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 390.000.000,00 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i> | | | | 5 Dokumen | 91.124.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 400.000.000,00 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i> | | | | 120 Orang | 150.381.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 530.000.000,00 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | | 147.030.800,00 | | | | | | | 190.000.000,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 147.030.800,00 | | | | | | | 190.000.000,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 147.030.800,00 | | | | | | | 190.000.000,00 | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>nilai SAKIP perangkat daerah</i> | - | | | 73 nilai | 17.030.800,00 | | | | | | - | 30.000.000,00 | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i> | - | | | 2 Laporan 5 Dokumen | 17.030.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 30.000.000,00 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 5 Dokumen | 6.351.300,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 15.000.000,00 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | | | | 4 Laporan | 10.679.500,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 15.000.000,00 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 2. | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | <i>cakupan koordinasi POK</i> | - | | | 100 persen | 130.000.000,00 | | | | | | - | 160.000.000,00 | |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | <i>Terlaksananya program perekonomian dan pembangunan</i> | - | | | 100 prosen | 130.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 160.000.000,00 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i> | | | | 3 Laporan | 130.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 160.000.000,00 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | | | | | | | | 237.864.000,00 | | | | | | | 595.000.000,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 237.864.000,00 | | | | | | | 595.000.000,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 237.864.000,00 | | | | | | | 595.000.000,00 | |
| 1. | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | <i>cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan</i> | - | | | 100 persen | 237.864.000,00 | | | | | | - | 595.000.000,00 | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | <i>jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian</i> | - | | | 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan | 71.470.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 01 Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah | masyarakat | - | 80.000.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i> | | | | 2 Dokumen | 25.311.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 01 Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah | masyarakat | | 45.000.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i> | | | | 4 Laporan | 33.666.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 01 Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah | masyarakat | | 20.000.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i> | | | | 2 Dokumen | 12.493.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk | masyarakat | | 15.000.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | <i>jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan</i> | - | | | 2 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen | 166.394.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan | masyarakat | - | 515.000.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA |
| | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i> | | | | 3 Dokumen | 153.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEBAKAU (CHT) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan | masyarakat | | 500.000.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian</i> | | | | 2 Dokumen | 2.294.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan | masyarakat | | 3.000.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | |
| | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</i> | | | | 2 Dokumen | 11.100.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan | masyarakat | | 12.000.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | |
| | | BAGIAN UMUM | | | | | | | 4.924.051.200,00 | | | | | | | 3.900.950.000,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 4.924.051.200,00 | | | | | | | 3.900.950.000,00 | | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 4.924.051.200,00 | | | | | | | 3.900.950.000,00 | | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan</i> | - | | | 100 prosen | 4.924.051.200,00 | | | | | | - | 3.900.950.000,00 | | |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>persentase terselenggaranya administrasi barang milik daerah</i> | - | | | 100 persen | 210.500.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 213.950.000,00 | BAGIAN UMUM | |
| | 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 210.500.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 213.950.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian</i> | - | | | 1 Dokumen | 3.906.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 7.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i> | | | | 1 Dokumen | 3.906.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 7.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i> | - | | | 1 unit | 148.387.700,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 92.000.000,00 | BAGIAN UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 148.387.700,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 92.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i> | - | | | 1 unit | 3.201.257.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 2.092.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 1 Unit | 850.553.600,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 790.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 1 Unit | 379.913.900,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 390.500.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i> | | | | 1 Unit | 45.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 49.500.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 1 Unit | 338.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 214.500.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 1.462.790.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 510.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 125.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 137.500.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | <i>jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan</i> | - | | | 1 paket | 1.360.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 1.496.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 660.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 726.000.000,00 | BAGIAN UMUM | |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 660.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 726.000.000,00 | BAGIAN UMUM | |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 40.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 44.000.000,00 | BAGIAN UMUM | |
| | | BAGIAN ORGANISASI | | | | | | | 159.240.500,00 | | | | | | | 285.000.000,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 159.240.500,00 | | | | | | | 285.000.000,00 | | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 159.240.500,00 | | | | | | | 285.000.000,00 | | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</i> | - | | | 89 nilai | 159.240.500,00 | | | | | | - | 285.000.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | <i>jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana</i> | - | | | 2 Dokumen 3 Laporan | 159.240.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | - | 285.000.000,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i> | | | | 2 Dokumen | 33.467.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 43.000.000,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i> | | | | 3 Laporan | 60.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 115.000.000,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i> | | | | 4 Dokumen | 26.600.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 75.000.000,00 | BAGIAN ORGANISASI | |
| | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i> | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 12.000.000,00 | BAGIAN ORGANISASI | |
| | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i> | | | | 3 Dokumen | 29.173.500,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | ASN | | 40.000.000,00 | BAGIAN ORGANISASI | |
| | | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | | | | | | | 703.391.000,00 | | | | | | | 783.600.000,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 703.391.000,00 | | | | | | | 783.600.000,00 | | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 703.391.000,00 | | | | | | | 783.600.000,00 | | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan</i> | - | | | 100 prosen | 703.391.000,00 | | | | | | - | 783.600.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | <i>jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan</i> <i>jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan</i> <i>jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan</i> | - | | | 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan | 703.391.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | - | 783.600.000,00 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i> | | | | 1 Laporan | 33.272.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 36.600.000,00 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i> | | | | 1 Laporan | 445.987.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 500.000.000,00 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|----------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i> | | | | 0 Laporan | 224.132.000,00 | Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar | masyarakat | | 247.000.000,00 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | | | | | 40.078.614.257,00 | |

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

Pada hari ini Jum'at tanggal 17 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja Badan/Dinas Sekretariat Daerah, dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, paling sedikit memuat :
1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 5. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Pj. Sekretaris Daerah
Kota Salatiga



Drs. MUTHQIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196901091990011002

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA
Kota Salatiga



AZIS MUSLIM, SE, MM
NIP. 197402172005011005

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Sekretariat Daerah Kota Salatiga

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|-------|---|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidaksesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja. | | ✓ | Belum ada | Sudah dilampirkan |
| 2. | Pengolahan data dan informasi. | ✓ | | | |
| 3. | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 4. | Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 5. | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 6. | Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 7. | Perumusan tujuan dan sasaran. | | ✓ | Belum sesuai Renstra 25-29 | Sudah disesuaikan |
| 8. | Penelaahan usulan masyarakat. | | ✓ | Belum ada | Sudah ditambahkan |
| 9. | Perumusan kegiatan prioritas. | | ✓ | Belum ada | Sudah ditambahkan |
| 10. | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 10.a. | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. | ✓ | | | |
| 10.b. | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 10.c. | Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan | ✓ | | | |
| 10.d. | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota. | ✓ | | | |

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|-----|---|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 11. | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. | ✓ | | | |
| 12. | Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 13. | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. | ✓ | | | |
| 14. | Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan. | | ✓ | Baru akan disahkan setelah ini | |

Formulir E.71
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Sekretariat Daerah Kota Salatiga

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
|----|--|--|
| 1. | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP. | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah belum mengacu pada Renstra PD Tahun 2025 - 2029 (sudah di TL) |
| 2. | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional | Perumusan rencana program dan kegiatan yang mendukung prioritas kota, nasional dan provinsi belum ada (sudah di TL) |

Formulir Verifikasi Sistematika Renja PD Tahun 2026

SEKRETARIAT DAERAH

Kota Salatiga

| Sistematika | | Jenis Kegiatan | Hasil Pencermatan | | |
|-------------|---|---|-------------------|-------|---|
| | | | Kesesuaian | | Tindak Lanjut/Keterangan |
| | | | Ada | Tidak | |
| I.1 | Latar belakang | Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2026 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja PD | ✓ | | |
| I.2 | Dasar hukum penyusunan | Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum. | ✓ | | <ul style="list-style-type: none"> - Perda 7/2025 ttg RPJMD 25-29 - Tambahkan perwali nomor 25 tahun 2025 tentang RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 - Tambahkan perda provinsi jawa tengah tentang RPJPD <p>(sudah di TL)</p> |
| I.3 | Maksud dan tujuan | Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD | ✓ | | |
| I.4 | Sistematika penulisan | Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD | ✓ | | |
| II.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 & Capaian Renstra PD Tahun 2024 | Tabel evaluasi Renja Tahun 2024 Tabel T-C. 29 | | ✓ | <p>Belum mencantumkan BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan, penutup pada BAB V</p> <p>(sudah di TL)</p> |
| II.2 | Analisa Kinerja Pelayanan | IKU, SPM, IKK, Uraian Indikator yang belum memenuhi target Tabel T-C. 30 | ✓ | | Tambahkan uraian IKU, SPM, IKK dan Indikator yang belum memenuhi |

| Sistematika | | Jenis Kegiatan | Hasil Pencermatan | | |
|-------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------|---|
| | | | Kesesuaian | | Tindak Lanjut/Keterangan |
| | | | Ada | Tidak | |
| | | | | | target (sudah di TL) |
| II.3 | Permasalahan dan Isu Strategis PD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana Tingkat kinerja PD dan hal kritis terkait pelayanan; 2. Permasalahan dan hambatan yg dihadapi; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi KaDa, tuj dan sasaran Pemda dan program prioritas; 4. Tantangan dan peluang; 5. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan dalam perumusan program dan kegiaran priotas tahun n. | ✓ | | |
| | | <p>Isu strategis sesuai dengan menyimpulkan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permasalahan b. Indikator yang belum dicapai | | ✓ | <p>Belum terdapat isu strategis perangkat daerah</p> <p>(sudah di TL)</p> |
| II.4 | Review terhadap RKPD | <p>Tabel review RKPD dan Analisis Kebutuhan</p> <p>Tabel T-C. 31</p> | ✓ | | <p>Bandingkan dengan RKPD 2026, namun hasil analisis kebutuhan mengacu pada Renstra 25-29</p> <p>Perbaiki tabel T-C.31</p> <p>Sesuaikan kembali indikator kinerja pada Tabel TC.31 sesuai dengan Renstra 25-29</p> <p>Perbaiki judul sub bab II.4 review terhadap RKPD, bukan rancangan</p> |

| Sistematika | | Jenis Kegiatan | Hasil Pencermatan | | |
|-------------|---|--|-------------------|-------|---|
| | | | Kesesuaian | | Tindak Lanjut/Keterangan |
| | | | Ada | Tidak | |
| | | | | | awal |
| II.5 | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | <p>1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;</p> <p>2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Tabel T-C.32</p> | | ✓ | <p>Tambahkan usulan Hibah yang direkomendasikan Tim Penyusun RKPD untuk Baznas sebesar 100 jt</p> <p>(sudah di TL)</p> |
| III.1 | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi | Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. | | ✓ | <p>Tambahkan telaah terhadap kebijakan provinsi dan nasional yang berkaitan tentang tugas pokok dan fungsi PD (periode tahun 2025-2029)</p> <p>Ambil arah kebijakan dan prioritas pembangunan baik nasional maupun provinsi (contoh dokumen rujukan : RPJMN, RPJMD/Renstra Provinsi) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi setda</p> |
| III.2 | Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun | Tujuan dan sasaran mengacu pada dokumen Renstra 2025-2029 | | ✓ | Tujuan dan Sasaran disesuaikan dengan |

| Sistematika | | Jenis Kegiatan | Hasil Pencermatan | | |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------|-------|--|
| | | | Kesesuaian | | Tindak Lanjut/Keterangan |
| | | | Ada | Tidak | |
| | 2026 | | | | Renstra 2025-2029 (sudah di TL) |
| III.3 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | <p>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029</p> <p>Berisikan Penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; 4. Melampirkan rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel T-C.33 | | ✓ | <p>Tambahkan poin 1-3 sebagaimana penjelasan disamping pada sub bab ini</p> <p>(sudah di TL)</p> <p>Perhatikan kembali pada halaman 35, RPD sudah tidak digunakan</p> <p>Pagu pada Tabel TC.33 belum sesuai dengan Bab IV</p> |
| IV.1 | Rencana Kerja dan Pendanaan | beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif (cetak renja dari SIPD RI) | | ✓ | <p>Belum mencantumkan BAB IV, tambahkan uraian sebagaimana penjelasan disamping</p> <p>(sudah di TL)</p> |
| V | Penutup | <p>Bab ini memuat diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. | | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> - Penutup pada Bab V - TTD oleh Wali Kota Salatiga <p>(sudah di TL)</p> |

| Sistematika | Jenis Kegiatan | Hasil Pencermatan | | | |
|-------------|----------------|--|-------|--------------------------|--|
| | | Kesesuaian | | Tindak Lanjut/Keterangan | |
| | | Ada | Tidak | | |
| | | 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut. | | | |

Keputusan Sekretaris Daerah

Nomor : 050-05/22/102.2/2023

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Perangkat Daerah : Bagian Administrasi
Pembangunan

Tanggal : 26 Januari 2023





PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724
Telp. (0298) 326767 Fax (0298) 321398 Situs <http://salatiga.go.id>
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan kelancaran perencanaan program dan kegiatan sesuai rencana strategis Sekretariat Daerah agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, telah dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan tim, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 060.1-05/49/102.2/2022 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

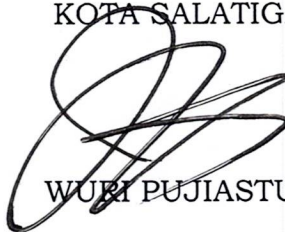
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. melakukan sinkronisasi terhadap rancangan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja yang disusun oleh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai bahan penetapan; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 060.1-05/49/102.2/2022 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,



WURI PUJIASTUTI

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Salatiga;
5. Segenap anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

| No. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda | Ketua |
| 3. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda | Wakil Ketua I |
| 4. | Asisten Administrasi Umum Sekda | Wakil Ketua II |
| 5. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda | Sekretaris |
| 6. | Kepala Bagian Hukum Setda | Anggota |
| 7. | Kepala Bagian Pemerinatahan Setda | Anggota |
| 8. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda | Anggota |
| 9. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda | Anggota |
| 10. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda | Anggota |
| 11. | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda | Anggota |
| 12. | Kepala Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 13. | Kepala Bagian Umum Setda | Anggota |
| 14. | Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda | Anggota |
| 15. | Unsur Bagian Hukum Setda | Anggota |
| 16. | Unsur Bagian Pemerintahan Setda | Anggota |
| 17. | Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda | Anggota |
| 18. | Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda | Anggota |
| 19. | Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda | Anggota |
| 20. | Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda | Anggota |
| 21. | Unsur Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 22. | Unsur Bagian Umum Setda | Anggota |

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,



WURI PUJIASTUTI



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724
Telp. (0298) 326767 Fax (0298) 321398 Situs <http://salatiga.go.id>
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 050-05/22/102.2/2023

TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan kelancaran perencanaan program dan kegiatan sesuai rencana strategis Sekretariat Daerah agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, telah dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan tim, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 060.1-05/49/102.2/2022 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. melakukan sinkronisasi terhadap rancangan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja yang disusun oleh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai bahan penetapan; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 060.1-05/49/102.2/2022 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI



Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Salatiga;
5. Segenap anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 050-05/22/102-2/2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

| No. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda | Ketua |
| 3. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda | Wakil Ketua I |
| 4. | Asisten Administrasi Umum Sekda | Wakil Ketua II |
| 5. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda | Sekretaris |
| 6. | Kepala Bagian Hukum Setda | Anggota |
| 7. | Kepala Bagian Pemerinatahan Setda | Anggota |
| 8. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda | Anggota |
| 9. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda | Anggota |
| 10. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda | Anggota |
| 11. | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda | Anggota |
| 12. | Kepala Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 13. | Kepala Bagian Umum Setda | Anggota |
| 14. | Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda | Anggota |
| 15. | Unsur Bagian Hukum Setda | Anggota |
| 16. | Unsur Bagian Pemerintahan Setda | Anggota |
| 17. | Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda | Anggota |
| 18. | Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda | Anggota |
| 19. | Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda | Anggota |
| 20. | Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda | Anggota |
| 21. | Unsur Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 22. | Unsur Bagian Umum Setda | Anggota |

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

